

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Politik Lingkungan**

Politik Lingkungan merupakan interaksi politik dengan lingkungan yang memiliki pandangan utama terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Politik lingkungan hadir sebagai bentuk dari adanya keresahan terhadap kondisi keberlangsungan lingkungan hidup. Pada awalnya isu mengenai lingkungan hidup hanya digaungkan oleh kalangan pencinta lingkungan, namun demikian isu mengenai lingkungan hidup saat ini sudah menjadi isu yang mendapat perhatian masyarakat dunia. Hal ini diawali pada tahun 1972 terdapat agenda PBB mengenai realisasi konferensi lingkungan hidup yang dilaksanakan di Stockholm, dengan pembahasan mengenai hukum Internasional lingkungan yang tentu saja didalamnya turut serta membahas mengenai permasalahan lingkungan hidup, pada akhirnya konferensi tersebut menghasilkan Deklarasi Stockholm tentang Lingkungan Manusia, yang menggarisbawahi pentingnya pelestarian lingkungan hidup (Apriawan, 2012). Sejak saat itu isu mengenai lingkungan hidup terus berkembang dan menjadi perhatian bagi pemerintah dari masing-masing tiap negara<sup>3</sup>. Maka dari itu pemerintah sebagai pemangku kepentingan, dalam proses pembuatan peraturan serta menjalankan peraturan perlu

---

<sup>3</sup> Setelah adanya Deklarasi Stockholm, terdapat konferensi serupa yang membahas lingkungan, seperti konferensi tentang Biodiversity di Rio de Janeiro Brasil tahun 1992 dan lain sebagainya.

adanya ikut andil bagian perspektif lingkungan, salah satunya melalui keterlibatan politik lingkungan.

Politik lingkungan adalah politik mengenai pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah harus mendesain kebijakan yang tepat dalam menangani masalah lingkungan dan politik lingkungan menawarkan berbagai opsi dan alternatif yang dapat diambil dalam menangani pengelolaan sumber daya alam. Politik lingkungan dapat didefinisikan sebagai instrumen untuk memahami kompleksitas kepemilikan akses dan kontrol terhadap sumber daya dan dampaknya terhadap kesehatan lingkungan dan keberlanjutannya (Robertua, 2020).

Politik lingkungan memiliki pengaruh terhadap pembuatan kebijakan. Adapun alur dari proses kebijakan, menurut Kraft, proses kebijakan terdiri atas enam tahap yaitu *agenda setting*, *policy formulation*, *policy legitimation*, *policy implementation*, *policy and program evaluation* dan terakhir, *policy change*. Dalam proses kebijakan yang memberikan dampak terhadap keberlangsungan lingkungan tentunya bisa dilaksanakan melalui persepektif politik lingkungan. Kraft menggambarkan dalam perspektif politik lingkungan terdapat tiga perspektif yaitu perspektif ilmu pengetahuan, perspektif ekonomi dan perspektif etika lingkungan (Kraft, 2011).

Perspektif pertama mengenai perspektif ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai perspektif dimana politik lingkungan mengadopsi dan mengadaptasi kebenaran yang disepakati oleh kaum akademik, dengan

begitu permasalahan mengenai lingkungan bisa diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Sehingga dalam pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi landasan yang utama dalam menentukan kebijakan. Selanjutnya dalam perspektif yang kedua mengenai perspektif ekonomi didefinisikan sebagai perspektif yang menjadikan untung rugi sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan, dengan begitu dalam pengambilannya berorientasi terhadap untung rugi secara material dengan mengesampingkan dampak kebijakan terhadap lingkungan.

Perspektif yang ketiga yaitu perspektif etika lingkungan didefinisikan sebagai perspektif yang menjadikan lingkungan sebagai suatu hal yang berharga dan menjadikan kondisi lingkungan sebagai yang paling utama di atas segalanya. Perspektif etika lingkungan menjadi kritik terhadap dua perspektif sebelumnya yang dinilai hanya memikirkan kepentingan manusia tanpa mempertimbangkan aspek kehidupan non-manusia serta tidak memperhatikan kebenaran dan rasionalitas terhadap lingkungan. Perspektif ini sekaligus menjadi alat perlawanan untuk mendapatkan hak dan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak nyata ancaman ekologi.

Dari ketiga perspektif tersebut tentunya memiliki tujuan dan maksud tersendiri dalam upaya pengelolaan lingkungan, namun demikian perspektif etika lingkungan menjadi tinjauan utama dalam isu lingkungan pada penelitian ini, sebab perspektif etika lingkungan menjadi alat untuk

mendapatkan keadilan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar kawasan TPA Ciangir.

Verdinand Robertua menjabarkan di dalam kelompok institusi, hukum menjadi luaran dinamika politik lingkungan. Konstitusi akan mempengaruhi lingkungan hidup dan selanjutnya mempengaruhi kepemilikan dan *division labor* yang berakhir kepada konstruksi hukum dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Di dalam kelompok simbol, mitos dan moralitas merupakan luaran ekologi yang terbentuk dari pengaruh konstitusi terhadap budaya, teknologi dan bahasa (Robertua, 2020).

Selanjutnya terdapat diskursus penting dalam politik lingkungan, yaitu Antroposentrisme dan Ekosentrisme. Antroposentrisme adalah sebuah pemikiran yang fokus kepada keuntungan yang diperoleh manusia sedangkan ekosentrisme fokus kepada keutuhan dan keberlanjutan Bumi sebagai sebuah kesatuan tunggal (Richardson 1997). Dalam Antroposentris memandang manusia sebagai pusat alam yang memiliki hak atas keseluruhan alam serta memegang kendali utama atas keberlangsungan lingkungan hidup. Sehingga baik secara langsung atau tidak langsung menentukan tatanan ekosistem melalui tindakan yang diambil sehubungan dengan alam. Antroposentris melihat manusia sebagai nilai yang paling penting serta alam dipandang hanya sekedar obyek tanpa nilai serta sekedar alat dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Dengan demikian, anthroposentris melihat bahwa alam dan makhluk hidup

yang bukan manusia akan dikelola dan dimanfaatkan untuk memastikan manusia tetap bertahan dan berkembang.

Ekosentrisme menempatkan alam dan manusia sejajar serta memberikan nilai kepada semua entitas kehidupan dan lingkungan sehingga semua makhluk hidup layak mendapatkan pertimbangan dan kepedulian moral. Dengan begitu ekosentris menjadikan keberlangsungan ekosistem dan menjaga keseimbangan ekologi sebagai tujuan utama. Ekosentris menyadari adanya saling keterkaitan antar ekosistem yang masing-masing memiliki peran dalam menjaga keseimbangan dan fungsi ekosistem. Dalam politik lingkungan, Antroposentrisme dan Ekosentrisme masing-masing memperebutkan kebenaran relatif.

Berdasarkan penjelasan tersebut Ekosentrisme dan Perspektif Etika Lingkungan memiliki landasan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini, sehingga peneliti menggunakan Ekosentrisme dan perspektif etika lingkungan sebagai landasan teori yang digunakan guna mencapai tujuan dari penelitian.

### **2.1.2 Politik Hijau**

Politik Hijau merupakan bentuk daya upaya untuk menciptakan kebijakan yang berorientasi terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pada dasarnya dalam menghadapi permasalahan lingkungan diawali gerakan sosial melalui gerakan aksi, namun demikian seiring berjalannya waktu diperlukan adanya perubahan signifikan dalam upaya menciptakan kebijakan yang peduli terhadap aspek lingkungan. Maka dari itu perlu

adanya ikut serta secara langsung masuk kedalam sistem pemerintahan dengan tujuan untuk memiliki pengaruh dalam proses pengambilan kebijakan.

Politik Hijau adalah usaha untuk menciptakan kebijakan dan praktik-praktik sosial yang akan memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan manusia sejalan dengan pelestarian ekosistem bumi dengan perpaduan antara keadilan lingkungan, keberlanjutan ekologis, dan demokrasi partisipatif yang menyoroti bahwa politik hijau tidak hanya tentang isu-isu lingkungan, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan politik. (Dobson,A,2007). Berdasarkan hal tersebut politik hijau bisa didefinisikan sebagai upaya untuk menciptakan kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan alam, pengembangan energi ramah lingkungan, dan pengembangan kesejahteraan sosial sebagai kesatuan dalam eksosistem dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, pelestarian lingkungan, dan pertanggungjawaban sosial.

Burchill, S., & Linklater, A. (1996) menjelaskan politik hijau dapat diidentifikasi bahwa agenda utama dari teori politik hijau adalah memberikan penjelasan tentang krisis ekologis yang dihadapi manusia dan memberikan dasar normatif dalam menghadapi krisis tersebut. Sehingga politik hijau dalam mengatasi permasalahan lingkungan mencakup pertimbangan etika dan normatif untuk membimbing tindakan politik dan kebijakan melalui pengembangan pandangan serta prinsip-prinsip yang

dapat membentuk cara manusia berinteraksi dengan alam dan satu sama lain.

Isu mengenai permasalahan lingkungan Dobson (2007), menyebutkan ada tiga argumentasi penting. Argumentasi pertama adalah solusi teknologi tidak dapat mengatasi permasalahan lingkungan. Solusi teknologi tidak mampu menyelesaikan krisis yang ada namun hanya mampu menunda krisis tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan kaum modernis yang menganggap bahwa solusi bagi permasalahan lingkungan adalah pengetahuan dan teknologi. Argumentasi kedua yaitu peningkatan pertumbuhan berarti penumpukan bahaya yang mampu berakhir pada bencana. Semakin cepat pertumbuhan, maka semakin sempit ruang yang ada dan kemampuan untuk menampung pertumbuhan yang semakin meningkatpun semakin berkurang. Argumentasi ketiga adalah permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan pada dasarnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Ini mengindikasikan bahwa berbagai aspek lingkungan saling terkait, dan tindakan di satu area dapat memiliki dampak signifikan pada area lainnya. Pendekatan holistik ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah lingkungan memerlukan pemahaman yang menyeluruh dan penanganan serentak terhadap berbagai isu lingkungan.

Sesuai dengan argumentasi yang telah dijelaskan diatas, permasalahan yang diangkat pada penelitian ini tentunya sesuai dan memiliki korelasi dengan argumentasi yang telah diuraikan. Untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini politik hijau memiliki landasan

dalam mengatasi permasalahan yang diangkat, sebab politik hijau memiliki tujuan utama menciptakan jaminan keberlanjutan lingkungan serta kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang.

Konsep Politik Hijau dengan dua konsep utamanya; keberlanjutan ekologis (*ecological sustainability*) serta desentralisasi tata kelola lingkungan, menjadi jalan alternatif bagi penyelesaian masalah lingkungan yang biasanya bertumpu pada konsep pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*) (Chabibah,2018).

Konsep desentralisasi sebagai implementasi politik hijau dalam kontrol yang lebih baik bisa dilakukan oleh pemerintah serta *stakeholder* daerah terkait, sebab dalam mengatasi kontrol terhadap permasalahan mengenai lingkungan dapat lebih efektif dilaksanakan dalam skala yang lebih kecil, yakni skala komunitas lokal yang langsung memiliki interdependensi terhadap alam sekitar dalam kehidupan mereka serta adanya usaha dan komitmen dalam mencapai keberlangsungan ekologi (Barry,J. 2005). Dengan begitu politik hijau melalui desentralisasi tata kelola lingkungan dan pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai penguat dalam analisis etika lingkungan sebagai tujuan dalam penelitian ini dan diharapkan bisa mendeskripsikan terkait permasalahan fenomena krisis lingkungan di sekitar TPA Ciangir.



## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan fundamental dalam penelitian sebagai suatu struktur konseptual yang mencakup teori, observasi, fakta, serta kajian pustaka untuk membantu peneliti dalam membentuk alur penelitian secara keseluruhan. Dengan adanya kerangka pemikiran diharapkan peneliti mampu menyusun konsep yang relevan yang selanjutnya akan diteliti serta disajikan dalam permasalahan penelitian. Adapun konsep penelitian ini mengacu pada konsep penelitian permasalahan lingkungan di sekitar kawasan TPA Ciangir dengan analisis perspektif politik lingkungan.

Penelitian ini berfokus pada krisis lingkungan di sekitar kawasan TPA Ciangir sebagai objek utama yang akan dikaji. Berdasarkan *World Wildlife Fund*, *United Nations Environment Programme*, indikator krisis lingkungan yang disebabkan oleh sampah diantaranya meliputi: Peningkatan jumlah sampah, pencemaran air dan udara, kerusakan ekosistem dan kesehatan manusia yang terancam. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi krisis lingkungan di sekitar kawasan TPA Ciangir dalam perspektif politik lingkungan, yang didalamnya mengkaji peran pemerintah, NGO, masyarakat dan pihak swasta, yang berpengaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana krisis lingkungan di sekitar kawasan TPA Ciangir bisa terjadi. Selanjutnya penelitian ini mengeksplorasi peran-peran pemerintah serta regulasinya, serta keterlibatan masyarakat dan NGO dari aktivis atau pemerhati lingkungan. Adapun analisis yang dilakukan

menggunakan teori politik lingkungan dengan Persepektif Etika Lingkungan dan Ekosentrisme

Penelitian ini memiliki tujuan mengidentifikasi permasalahan lingkungan di sekitar kawasan TPA Ciangir dalam perspektif politik lingkungan, sehingga bisa menjelaskan peran pemerintah melalui kebijakan atau regulasi-regulasi yang dibuat serta dijalankan berdasarkan realita yang ada, peran dan sudut pandang NGO terhadap permasalahan tersebut, serta masyarakat sekitar kawasan TPA Ciangir, Analisis yang digunakan melalui politik lingkungan sebagai analisis utama dalam penelitian. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengidentifikasi krisis lingkungan melalui analisis politik lingkungan sehingga bisa merancang kebijakan yang lebih baik untuk keberlangsungan lingkungan saat ini dan generasi yang akan datang, sebab sudah semestinya setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Gambar 2

## Kerangka Pemikiran

